

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas dinamika Latar belakang akar keserumpunan antara Indonesia dan Malaysia, kasus-kasus Klaim kebudayaan yang pernah dilakukan oleh Malaysia hingga kebijakan kebudayaan pemerintah Indonesia pada periode 2007–2019. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan, respons masyarakat, serta pengaruhnya terhadap hubungan bilateral dan internasional. Hubungan kebudayaan serumpun antara Indonesia dan Malaysia terbentuk melalui interaksi panjang sejak masa kerajaan-kerajaan Melayu kuno seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Melaka yang menjalin hubungan dagang, politik, dan migrasi penduduk di kawasan Asia Tenggara. Hubungan ini menciptakan kesamaan dalam bahasa Melayu, aksara Jawi, serta kesenian seperti batik, wayang, dan musik tradisional yang berkembang bersama di kedua wilayah. Selain itu, masuknya Islam sebagai agama mayoritas di kedua negara memperkuat kesamaan nilai budaya dan tradisi masyarakat. Keserumpunan ini menjadi dasar kedekatan budaya Indonesia-Malaysia hingga saat ini, meskipun juga memunculkan potensi klaim atas beberapa unsur budaya karena sejarah kepemilikan yang tumpang tindih sejak masa lalu.

Konflik kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena kesamaan akar budaya Melayu yang membuat banyak unsur budaya seperti tari, musik, pakaian, dan kuliner memiliki kemiripan, sehingga memicu saling klaim kepemilikan. Hal ini

diperburuk oleh kurangnya pendokumentasian dan perlindungan hukum atas warisan budaya Indonesia, serta penggunaan unsur budaya tersebut oleh Malaysia untuk promosi pariwisata dan ekonomi kreatif mereka. Globalisasi dan media sosial juga memicu ketegangan karena masyarakat Indonesia merasa budayanya diambil tanpa penghargaan yang layak, sementara di sisi lain terdapat kesalahpahaman dalam komunikasi budaya yang belum diselesaikan secara diplomatik secara menyeluruh oleh kedua negara.

Berdasarkan dari temuan-temuan penelitian yang penulis kumpulkan, Penulis dapat mengatakan bahwa rentetan tindakan pengklaiman kebudayaan Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia antara tahun 2007 hingga 2017 itu dimulai sejak Malaysia memenangkan sengketa Konflik Sipadan Ligitan di Mahkamah Internasional tahun 2002 dan sengketa wilayah Ambalat pada tahun 2005 pasca konflik ini penulis mencatat mulai banyak terjadi rentetan kasus-kasus klaim yang dilakukan oleh Malaysia terhadap kebudayaan-kebudayaan Indonesia.

Dari penelitian ini penulis juga ingin mengemukakan temuan bahwasanya dari sekian banyak kebudayaan Indonesia yang di klaim oleh Malaysia penulis dapat berkesimpulan bahwa Kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang paling banyak di klaim oleh Malaysia yang mana fakta ini berbanding lurus dengan populasi masyarakat Jawa yang berada di Negara Malaysia baik sebagai perantau maupun sebagai warga negara Malaysia sendiri.

Dalam hal kebijakan Pada masa Orde Baru lebih cenderung menitikberatkan pada pelestarian budaya tradisional sebagai bagian dari proyek identitas nasional

tunggal. Namun, memasuki era Reformasi, terutama dalam kurun waktu 2007–2019, arah kebijakan bergeser untuk lebih mengakomodasi keberagaman budaya lokal serta mendorong diplomasi budaya sebagai bagian dari strategi hubungan luar negeri.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan kebudayaan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas lembaga, serta kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor kebudayaan. Meskipun demikian, terdapat capaian penting seperti pengakuan terhadap Warisan Budaya Takbenda (WBTB) Indonesia oleh *UNESCO* yang hingga penelitian ini dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia telah berhasil memperoleh pengakuan dari *UNESCO* terhadap 12 warisan budaya Indonesia yang didaftarkan kedalam kategori Warisan Budaya TakBenda (WBTb), peningkatan partisipasi dalam Pekan Kebudayaan Nasional, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan promosi kebudayaan di pentas internasional. Masyarakat juga menunjukkan respons positif melalui peningkatan partisipasi dalam pelestarian budaya lokal dan keterlibatan komunitas budaya dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Kegiatan kebudayaan terbukti menjadi sarana efektif dalam mendukung diplomasi Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, kebudayaan memainkan peran strategis dalam membangun kedekatan emosional dan memperkuat kerja sama kedua negara. Mengingat kedekatan historis dan etnolinguistik antara kedua bangsa, berbagai

pertukaran budaya seperti festival seni, pameran bersama, dan kerja sama pelestarian warisan budaya serumpun berkontribusi pada penguatan hubungan diplomatik.

Namun demikian, sensitivitas terhadap klaim budaya dan isu-isu kultural yang bersifat lintas batas juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kebijakan budaya Indonesia harus dirancang secara cermat untuk tidak hanya mempromosikan budaya ke luar negeri, tetapi juga membangun dialog kultural yang konstruktif dengan negara-negara serumpun, terutama Malaysia.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, komunitas budaya, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan infrastruktur budaya, meningkatkan investasi dalam pelatihan sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap fasilitas dan platform kebudayaan.

Strategi diplomasi budaya juga perlu dirancang secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan media baru, agar budaya Indonesia dapat menjangkau khalayak global secara lebih luas dan efektif. Dalam hubungan dengan Malaysia, pendekatan kolaboratif melalui kerja sama budaya lintas batas menjadi penting untuk memperkuat solidaritas regional sekaligus mengurangi potensi konflik akibat perbedaan klaim atau persepsi budaya. Di samping itu, sistem monitoring dan evaluasi kebijakan kebudayaan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan visi Indonesia sebagai negara multikultural yang aktif di kancah internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan kebudayaan Indonesia yang signifikan sejak era Orde Baru menuju era Reformasi menggambarkan keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam merawat dan menjaga kebudayaannya termasuk dalam menangani kasus klaim kebudayaan yang dilakukan oleh Negara Malaysia. berdasarkan temuan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa periode kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi menjadi Periode yang paling krusial dalam penanganan kasus klaim kebudayaan ini yang mana pada periode ini pemerintah sangat proaktif dalam upaya melahirkan kebijakan-kebijakan, diplomasi kebudayaan maupun aktivitas promosi kebudayaan yang di lakukan pada tingkat nasional dan Internasional.

Bukan tanpa alasan, pada periode ini sangatlah krusial karena pada dasarnya awal mula terjadi kasus klaim kebudayaan ini adalah pada tahun 2007 saat pemerintahan Presiden SBY dan pada saat itu hingga periode pemerintahan Presiden Jokowi yaitu 2019 tidak sedikitpun mengkendorkan perhatiannya masih terus aktif dan serius dalam meningkatkan upaya-upaya menjaga, merawat, melestarikan hingga mempromosikan kebudayaan-kebudayaan kita yang mana bisa dibuktikan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dan aktivitas-aktivitas kebudayaan yang dilakukan. namun secara keseluruhan pemerintah masih dapat mengatasi permasalahan itu dengan baik, bijak dan dengan tindakan yang tepat, Walaupun masih ada catatan-catatan yang harus terus ditingkatkan dan dievaluasi agar

kebudayaan yang menjadi kebanggaan dan identitas rakyat Indonesia tidak hilang ataupun diakui oleh Negara lain.

